



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 49.B /KPTS / I /2022

TENTANG

ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produk komoditas pertanian serta berkaitan dengan pengadaan penyaluran dan harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :49 Tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 200/SR..220/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 09/KPTS/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 299/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formulasi Pupuk An-Organik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 214/KPTS/MU/2022 tentang Alokasi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Alokasi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat antar Kecamatan menurut jenis dan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI dan VII Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Pos Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dan sumber Anggaran lain yang sah dan bertanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 21 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pertanian di Jakarta,
3. Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian di Jakarta,
4. Dirut PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk,
5. Direksi PT. Petrokimia Gresik Tbk,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Camat se - Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di *Tempat*.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 49.B /KPTS/I/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PETANI	LUAS TANAM (Ha)	ALOKASI MENURUT JENIS PUPUK (TON)					
				UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK GRANUL	ORGANIK CAIR (LITER)
1	Sahu Timur	39	117	80.28	1	7	99	100	30
2	Ibu	91	250.25	79.72	4	11	105	200	55
3	Jailolo	40	44.4	50	1	3	30	50	10
4	Sahu	63	73.9	40	1	3	25	50	20
5	Jailolo Selatan	15	28.2	25	1	1	7	20	5
6	Tabaru	20	60	30	1	2	15	40	15
7	Ibu Selatan	21	58.5	15	2	1	5	20	10
8	Loloda	10	10	10	1	1	2	20	5
TOTAL		299	642.25	330	12	29	288	500	150

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

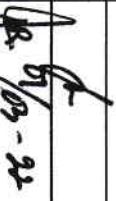
JAMES UANG

2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 49.8/KPTS/I/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	80.28	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	5.28
2	Ibu	79.72	7	7	7	5	7	7	7	5.72	7	7	7	6
3	Jailolo	50	4.3	4.3	4.3	3.9	4.3	4.3	4.3	3.7	4.3	4.3	4.3	3.7
4	Sahu	40	3.5	3.5	3.5	2.84	3.5	3.5	3.5	2.83	3.5	3.5	3.5	2.83
5	Jailolo Selatan	25	2.4	2.4	2.4	1.4	2.4	2.4	2.4	1	2.4	2.4	2.4	1
6	Tabaru	30	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2	2.6	2.6	2.6	2
7	Ibu Selatan	15	2	2	1	0.75	1.75	1	1	0.75	2	1	1	0.75
8	Loloda	10	1	1	1	0.5	1	1	1	0.5	1	1	0.5	0.5
TOTAL		330	29.8	29.8	28.8	22.99	29.55	28.8	28.8	22.5	29.8	28.8	28.3	22.06

PEJABAT		PARAF
Sekretaris Daerah		
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan		18.01/03-22
Kadis Pertanian & Ketpang		29
Kabag Hukum		

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 49.B/KPTS/I/2022

TANGGAL : 21 JANUARI 2022

TENTANG

DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

JENIS PUPUK

: SP-36

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
2	Ibu	4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2
3	Jailolo	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
4	Sahu	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
5	Jailolo Selatan	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
6	Tabaru	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
7	Ibu Selatan	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.05
8	Loloda	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
TOTAL		12	1.2	1.2	1.2	0.48	1.1	1.2	1.2	0.39	1.2	1.2	1.2	0.43

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan	 01/03-22
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 46-B/KPTS/I/2022

TANGGAL : 21 JANUARI 2022

TENTANG

DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

JENIS PUPUK

: ZA

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	7	0.58	0.68	0.58	0.5	0.58	0.68	0.58	0.5	0.58	0.66	0.58	0.5
2	Ibu	11	0.9	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9
3	Jailolo	3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1
4	Sahu	3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1
5	Jailolo Selatan	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
6	Tabaru	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.05
7	Ibu Selatan	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
8	Loloda	1	0.1	0.1	0.1	0.03	0.1	0.1	0.1	0.04	0.1	0.1	0.1	0.03
TOTAL		29	2.58	2.68	2.58	1.89	2.58	2.68	2.58	1.77	2.68	2.66	2.58	1.74

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan	 15/03-22
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 49.B/KPTS/I/2022

TANGGAL : 21 JANUARI 2022

TENTANG

: DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

JENIS PUPUK

: NPK

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	99	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6
2	Ibu	105	9	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8
3	Jailolo	30	3	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1
4	Sahu	25	2.3	2.3	2.3	1.5	2.3	2.3	2.3	1.5	2.3	2.3	2.1	1.5
5	Jailolo Selatan	7	0.4	0.4	1.1	0.2	1.1	0.4	1.1	0.2	0.4	0.4	1.1	0.2
6	Tabaru	15	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5	0.5	1.5	1	1.5	1
7	Ibu Selatan	5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8	Loloda	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.05
TOTAL		288	25.8	25.8	26.5	18.3	26.6	25.3	26.5	17.65	25.8	25.3	26.3	18.15

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan	 01/03-22
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

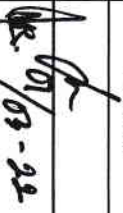
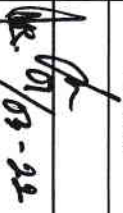
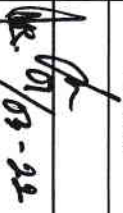
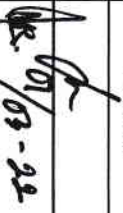


JAMES UANG



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40.8 /KPTS/1/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022
JENIS PUPUK : ORGANIK GRANULE

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	100	9	9	9	7	9	9	9	6	9	9	9	6
2	Ibu	200	17	17	17	15	18	17	17	15	18	17	17	15
3	Jailolo	50	4.3	4.3	4.3	3.9	4.3	4.3	4.3	3.7	4.3	4.3	4.3	3.7
4	Sahu	50	4.3	4.3	4.3	3.9	4.3	4.3	4.3	3.7	4.3	4.3	4.3	3.7
5	Jailolo Selatan	20	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.8	1.2	1.8	1.8	1.8	1.2
6	Tabaru	40	3.5	3.5	3.5	2.84	3.5	3.5	3.5	2.83	3.5	3.5	3.5	2.83
7	Ibu Selatan	20	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.8	1.2	1.8	1.8	1.8	1.2
8	Loloda	20	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.8	1.2	1.8	1.8	1.8	1.2
	TOTAL	500	43.5	43.5	43.5	36.84	44.5	43.5	43.5	34.83	44.5	43.5	43.5	34.83

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 49.B/KPTS/I/2022

TANGGAL : 21 JANUARI 2022

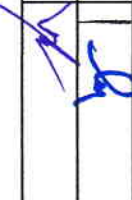
TENTANG

DAFTAR ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

JENIS PUPUK : ORGANIK CAIR

NO	KECAMATAN	TOTAL (TON)	KEBUTUHAN PUPUK (LITER)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sahu Timur	30	3	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	1
2	Ibu	55	5	5	5	4	5	5	5	4	4.4	4.3	4.3	4
3	Jaiolo	10	0.83	0.83	0.83	0.87	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
4	Sahu	20	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.8	1.2	1.8	1.8	1.8	1.2
5	Jaiolo Selatan	5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6	Tabaru	15	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5	0.5	1.5	1	1.5	1
7	Ibu Selatan	10	0.83	0.83	0.83	0.87	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
8	Loloda	5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	TOTAL	150	13.76	13.76	13.76	9.94	14.16	13.26	13.76	9.16	13.16	12.56	13.06	9.66

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pembangunan	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

